



ANALISIS VARIANS, PERTUMBUHAN, KESERASIAN BELANJA DALAM MENILAI KINERJA ANGGARAN PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN MUSI RAWAS

**ANGGIA SYAFITRI¹
NURBAITI²
FITRI YANTI²**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Musi Rawas

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja anggaran berdasarkan varians, pertumbuhan dan keserasian belanja pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas tahun 2011-2014. Tujuannya untuk mengetahui kinerja anggaran berdasarkan varians, pertumbuhan dan keserasian belanja pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas tahun 2011-2014. Terdapat empat variabel yakni varians belanja, pertumbuhan belanja, keserasian belanja dan kinerja anggaran. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif serta data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan varians belanja sudah baik, karena penyerapan anggaran belanja yang sudah efektif sebesar 92%, 90%, 87% dan 97% selama tahun 2011-2014. Pertumbuhan belanja menunjukkan berfluktuatif selama tahun 2011-2014 yakni sebesar -9,32%, 6,00% dan -0,94%. Keserasian belanja operasi tahun 2011-2014 menunjukkan kriteria sangat serasi yaitu dengan persentase 91%, 93%, 97% dan 93%.

Kata Kunci : Varians Belanja, Pertumbuhan Belanja, Keserasian Belanja, Kinerja Anggaran.

ABSTRACT

Variance Analysis, Spending Growth and the Expenditure Harmony In the Performance Budget On Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas/Public Accounting.

Formulation of the problem in this study is how the performance budget with variance, spending growth and the expenditure harmony on Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas in year 2011-2014. The aim of this study is to determine the performance budget with variance, spending growth and the expenditure harmony on Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas in year 2011-2014. There are four variables that are the variance expenditure, spending growth, expenditure harmony and performance budget. This is study includes qualitative and the data that is used are primary data and secondary data. Data Collection method used observation, interviews and documentation. The analysis of this study showed variance has been well, because budget by used effective amounting to 92%, 90%, 87% and 97% during the year 2011-2014. Shows spending growth fluctuated during the year 2011-2014, amounting to -9,32%, 6,00% and -0,94%. Compatibility of operation expenditure harmony in 2011-2014 shows a very harmonius criteria, namely the percentage of 91%, 93%, 97% and 93%.

Keywords : Variance, Spending Growth, Expenditure Harmony, Performance Budget.



PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Akuntansi keuangan daerah di Indonesia merupakan bidang akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi tahun 1998. Adanya kebijakan baru dari pemerintah Republik Indonesia yang mereformasi pengelolaan keuangan daerah dengan mengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1956 yang berkaitan dengan keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 berisi tentang perlunya otonomi daerah untuk meningkatkan kemandirian daerah, akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta pelayanan publik di daerah.

Perkembangan reformasi terus berlanjut dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagai penyempurnaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 sebagai perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999. Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2005 yang direvisi dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010. Tujuan Peraturan tersebut tidak hanya untuk membuat kewenangan pembiayaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi untuk lebih meningkatkan kinerja dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah.

Menurut Mardiasmo, 2009 dalam Abdul dan Syam (2012: 2) anggaran dalam sektor publik sering kali disebut dengan anggaran publik yang merujuk pada anggaran pemerintah yakni organisasi dalam sektor publik. Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana pendapatan dan belanja. Anggaran publik terwujud dalam APBN dan APBD yang merupakan inti dari keuangan pemerintahan karena anggaran merupakan informasi keuangan paling penting yang dihasilkan oleh pemerintah.

Pemerintah bertugas untuk menegakkan akuntabilitas keuangan karena pemerintah harus bertanggung jawab kepada publik atas anggaran

yang telah dilaksanakan. Sebagai perwujudan dari pelaksanaan akuntabilitas publik, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang dihasilkan atas anggaran publik tersebut. Menurut Mahmudi (2010: 32) tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kewajibannya memberikan pertanggungjawaban publik adalah menyediakan informasi mengenai kinerja pemerintah daerah.

Penyajian dalam laporan keuangan, pemerintah wajib untuk membuat sistem akuntansi yang digunakan. Sistem akuntansi yang dibuat pemerintahan daerah tersebut juga harus sejalan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan. Laporan keuangan pemerintah merupakan output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi tersebut sebagai pembuatan keputusan, alat pengendalian dan evaluasi kinerja khususnya kinerja anggaran bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja didalamnya. Jenis laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah meliputi laporan neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Kinerja anggaran pemerintah dapat dinilai dengan menganalisis laporan realisasi anggaran. Menganalisis laporan realisasi anggaran merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan realisasi anggaran guna untuk menilai kinerja anggaran, hasil tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Pemerintah daerah menggunakan laporan realisasi anggaran untuk menyediakan informasi dalam menilai kinerja anggaran daerah. Informasi laporan realisasi anggaran berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Menurut Mahmudi (2011: 127) laporan realisasi anggaran juga bermanfaat dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan keuangan secara komparatif tentang telah dilaksanakannya anggaran secara efisien, efektif, hemat, sesuai dengan anggaran serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kepala daerah merupakan selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dalam pemerintah daerah dan mendelegasikan

sebagian tanggungjawabnya kepada kepala SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah. Kepala SKPD yang menjalankan tugas tersebut harus membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah sebagai perangkat daerah dan juga selaku pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, SKPD diberikan alokasi dana (anggaran). Anggaran yang diberikan tersebut harus di pertanggungjawabkan karena untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik secara ekonomis, efisien dan efektif.

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BAPELUH PPK) Kabupaten Musi Rawas dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas nomor 03 tahun 2008. BAPELUH PPK Kabupaten Musi Rawas sebagai pengguna anggaran diharapkan harus membuat pertanggungjawaban atas belanja yang telah dilaksanakan. Anggaran belanja yang digunakan harus secara efektif, efisien dan hemat sesuai dengan program/kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan realisasi anggaran khususnya pos (elemen) belanja dianalisis guna melihat kinerja anggaran BAPELUH PPK Kabupaten Musi Rawas.

Analisis varians, pertumbuhan dan keserasian diteliti untuk sebagai koreksi atau evaluasi kinerja anggaran bagi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas dalam menggunakan APBD sesuai dengan peruntukannya. Analisis varians, pertumbuhan dan keserasian belanja sangat penting dalam pelaksanaan anggaran belanja. Hasil dilaksanakannya anggaran oleh BAPELUH PPK Kabupaten Musi Rawas, apakah sudah baik menjalankan anggaran belanja sesuai dengan yang sudah ditetapkan dan apakah realisasi anggaran belanja dialokasikan secara efektif, efisien dan seimbang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Varians, Pertumbuhan Dan Keserasian Belanja Dalam Menilai Kinerja Anggaran Pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas**”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan masalah penelitian

sebagai berikut : Bagaimana kinerja anggaran berdasarkan varians, pertumbuhan dan keserasian belanja pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas tahun 2011-2014 ?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja anggaran berdasarkan varians, pertumbuhan dan keserasian belanja pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas tahun 2011-2014.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

1. Kinerja Anggaran

Menurut Mahsun dkk (2013: 141) kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Kinerja anggaran merupakan suatu prestasi kinerja dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada pencapaian kinerja. Kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dengan pelaksanaan anggaran. Menurut Abdul dan Syam (2012: 126) penilaian kinerja berupa evaluasi terhadap kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.

Kinerja anggaran dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran. Satuan kerja perangkat daerah merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan. Sebagai perwujudan akuntabilitas satuan kerja perangkat daerah menggunakan anggaran belanja wajib dilaporkan kedalam laporan realisasi anggaran.

Menurut Mardiasmo dalam Abdul dan Syam (2012: 163) penilaian kinerja sektor publik adalah untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah sebab dengan adanya ukuran kinerja, pemerintah dapat berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja yang mengalokasikan sumber daya serta dalam pembuatan keputusan serta mewujudkan pertanggungjawaban publik.

Menurut Mardiasmo (2010: 124) anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja. Kinerja publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Penilaian dan evaluasi kinerja anggaran dapat dilakukan dengan memanfaatkan informasi dalam laporan realisasi anggaran.

Laporan atas belanja disusun guna memenuhi kebutuhan sebagai pertanggungjawaban yang sesuai dengan ketentuan dan juga diperlukan dalam pengendalian. Menurut Mahmudi (2010: 156) penilaian kinerja anggaran belanja dapat menggunakan analisis antara lain berupa:

- a) Analisis varians belanja
- b) Pertumbuhan belanja
- c) Keserasian belanja
- d) Rasio efisiensi belanja
- e) Rasio belanja terhadap PDRB

2. Varians Belanja

Belanja menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 belanja adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara/bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Jumlah anggaran belanja merupakan batas pengeluaran tertinggi untuk setiap jenis belanja.

Menurut Mahmudi (2010: 157) varians belanja merupakan perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Varians dapat digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi

kinerja anggaran yaitu dengan mengukur tingkat selisih baik menguntungkan ataupun yang tidak menguntungkan antara realisasi dengan anggaran.

Selisih anggaran dapat dikategorikan menjadi dua yaitu selisih yang menguntungkan (*favourable*) dan tidak menguntungkan (*unfavourable*). Varians belanja antara anggaran belanja dengan realisasinya bisa dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentasenya. *Favourable variance* adalah ketika realisasi belanja lebih kecil dari anggaran, sedangkan jika realisasi belanja lebih besar dari anggarannya maka dikategorikan *unfavourable variance*.

Penilaian kinerja anggaran pada umumnya menggunakan analisis varians atau selisih, karena analisis ini bisa langsung mengetahui efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan dinilai baik kinerja anggaran belanja apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan. Sebaliknya pemerintah daerah dinilai kurang baik jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan.

Perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran belanja dapat dihitung dengan menggunakan analisis varians belanja yaitu sebagai berikut:

$\text{Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$

Sumber : Mahmudi (2010: 157)

Berdasarkan selisih *favourable variance* atau *unfavourable variance* antara realisasi dengan anggaran belanja maka penilaian kinerja dari analisis varians belanja adalah sebagai berikut :

TABEL II.2.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA VARIANS BELANJA

Kriteria Varians Belanja	Ukuran
Baik	Realisasi Belanja \leq Anggaran Belanja
Kurang Baik	Realisasi Belanja $>$ Anggaran Belanja

Sumber : Mahmudi (2010: 159)

Menurut Mahmudi (2010: 159) penyerapan anggaran yang terlalu rendah tidak baik karena mengindikasikan kelemahan dalam perencanaan anggaran, namun dengan tidak melebihi anggaran yang sudah ditetapkan agar tidak ada pemborosan anggaran sehingga lebih efisien.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 penyerapan anggaran yang efektif yakni dengan persentase penyerapan sebesar 90%-100% dan penyerapan anggaran yakni diantara 80%-90% serta penyerapan anggaran belanja yang persentasenya dibawah 80% dapat dikatakan kurang efektif karena pelaksanaan anggaran belanja kurang baik.

3. Pertumbuhan Belanja

Menurut Mahmudi (2011: 162) pertumbuhan belanja adalah kenaikan atau penurunan belanja selama kurun waktu tertentu. Analisis pertumbuhan selain untuk menilai pos belanja dapat pula digunakan untuk menilai pertumbuhan aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan sebagainya.

$$\text{Belanja tahun} = \frac{\text{Realisasi belanja tahun}_t - \text{Realisasi belanja tahun}_{t-1}}{\text{Realisasi belanja tahun}_{t-1}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2010: 160)

Menurut Mahmudi (2010: 160) realisasi belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik setiap tahun, alasan kenaikan realisasi belanja bisa dikaitkan dengan adanya inflasi, perubahan kurs rupiah, dan penyesuaian faktor ekonomi. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang.

Berdasarkan pertumbuhan realisasi belanja baik berupa kenaikan atau penurunan belanja selama kurun waktu tertentu maka, kriteria penilaian kinerja adalah sebagai berikut :

TABEL II.3.
KRITERIA PENILAIAN KINERJA
PERTUMBUHAN BELANJA

Kriteria Pertumbuhan Belanja	Ukuran
Naik	Positif
Turun	Negatif

Sumber : Mahmudi (2010: 160)

4. Keserasian Belanja

Menurut Mahmudi (2010: 162) keserasian belanja adalah keseimbangan antar belanja. Keserasian belanja bagi pemerintah daerah bermanfaat dalam mengalokasikan keseluruhan belanja sesuai dengan kebutuhan rencana kerja anggaran. Dengan adanya keserasian belanja maka setiap pemerintah daerah dapat mengalokasi anggaran belanja yang menjadi prioritas belanja sesuai peruntukannya.

Belanja dikelompokkan yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan

Selaku organisasi sektor publik tentunya pemerintah daerah harus dapat mengendalikan belanja daerah, melakukan efisiensi belanja dan penghematan anggaran. Analisis pertumbuhan belanja perlu untuk dinilai guna mengetahui besarnya pertumbuhan masing-masing belanja dari tahun ketahun. Analisis pertumbuhan belanja dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Berdasarkan kelompok belanja, untuk mengetahui keseimbangan atau keserasian antar belanja dapat dianalisis dengan keserasian belanja antara lain yaitu berupa :

- a) Belanja operasi terhadap total belanja
- b) Belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Hasil perhitungan keseimbangan antar belanja dapat dilihat penilaian kinerja dari keserasian belanja yang ditentukan sebagai berikut :

TABEL II.4.
KRITERIA PENILAIAN KINERJA
KESERASIAN BELANJA

Kriteria Keserasian Belanja	Persentase (%)
Tidak Serasi	0% – 20%
Kurang Serasi	20% – 40%
Cukup Serasi	40% – 60%
Serasi	60% – 80%
Sangat Serasi	80% – 100%

Sumber : Mahsun, 2006 (dalam Mahmudi, 2010: 164)

a. Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Menurut Mahmudi (2010: 164) belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah.

Analisis belanja operasi terhadap total belanja digunakan untuk melihat proporsi total

belanja yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi terhadap total belanja dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Belanja operasi} = \frac{\text{Realisasi belanja operasi}}{\text{Total belanja}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2010: 164)

b. Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung

Menurut Mahmudi (2010: 165) belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, misalnya belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan misalnya belanja subsidi, pegawai bunga dan lain-lain. Belanja langsung dan belanja tidak langsung adalah belanja yang berdasarkan kelompok belanja.

Alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung merupakan alokasi total belanja dengan antar kelompok belanja. Analisis belanja langsung dan belanja tidak langsung bermanfaat untuk melihat prioritas belanja yang dianggarkan selama periode tertentu.

Menurut Mahmudi (2010: 165) analisis belanja langsung dan belanja tidak langsung dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Belanja langsung} = \frac{\text{Total belanja langsung} \times 100\%}{\text{Total belanja}}$$

Sumber : Mahmudi (2010: 165)

$$\text{Belanja TL} = \frac{\text{TB Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2010: 165)

5. Rasio Efisiensi Belanja

Menurut Mahmudi (2010: 166) rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur

tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah antara realisasi belanja dengan total belanja.

Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%. Sebaliknya jika lebih dari 100% maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran belanja.

Perbandingan antara realisasi dengan anggaran dalam rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Ratio EB} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2010: 166)

6. Rasio Belanja Daerah Terhadap PDRB

Menurut Mahmudi (2010: 166) rasio belanja terhadap PDRB merupakan perbandingan antara total belanja daerah dengan PDRB yang dihasilkan daerah. PDRB merupakan kependekkan dari *produc domestic regional bruto* atau pendapatan domestik regional bruto.

Rasio belanja daerah terhadap PDRB dilakukan untuk mengetahui produktivitas suatu daerah yang dihasilkan serta efektivitas dalam penggunaan belanja daerah yang dianggarkan.

Rasio ini menunjukkan produktivitas dan efektivitas belanja daerah. Perhitungan rasio PDRB terhadap total belanja maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Daerah Terhadap PDRB} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total PDRB}}$$

Sumber : Mahmudi (2010: 166)

7. Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)

Menurut Mardiasmo (2010: 18) good governance diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik tidak hanya dilihat dari segi pelayanan terhadap publik tetapi dilihat juga pengelolaan keuangan, apakah sudah melakukan efisiensi belanja, memperhatikan pertumbuhan serta keserasian belanja.

Karakteristik dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)

menurut UNDP dalam Mardiasmo (2010: 18) meliputi :

- a) *Participation*
Kerterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.
- b) *Rule of law*
Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
- c) *Transparancy*
Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
- d) *Consensus orientation*
Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- e) *Equity*
Setiap masyarakat dapat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
- f) *Effciency and effectiveness*
Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna. Efektif merupakan tepat guna atau berhasil guna atau tepat sasaran yang dapat dikatakan suatu kegiatan itu dapat tercapai. Sedangkan efisien adalah berdaya guna atau mampu memanfaatkan sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
- g) *Accountability*
Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
- h) *Strategic vision*
Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi yang jauh kedepan.

Transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah merupakan tuntutan publik yang harus direspon secara positif. Menurut Mahmudi (2010: 3) tranparansi dilakukan sehingga publik akan memperoleh informasi yang aktual, serta informasi tersebut dapat digunakan untuk :

- a) Membandingkan kinerja yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi dengan anggaran)
- b) Menilai perencanaan dengan pelaksanaan anggaran.

Menurut Serdamayanti (2012: 42) pemerintahan yang baik berorientasi kepada pemerintahan yang berfungsi secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya pencapaian tujuan. Kegiatan pemerintahan harus diarahkan untuk

menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dari berbagai sumber-sumber yang tersedia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu: penelitian dibidang akademis dengan tujuan terapan dan penulis menggunakan tingkat eksplanasi deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Varians Belanja Pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan varians belanja negatif, hal ini menunjukkan bahwa adanya realisasi yang kurang dari anggaran pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas.

Efisiensi anggaran belanja yang dilakukan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat dari hasil perhitungan varians belanja. Adanya varians negatif tersebut, sehingga lebih efisien dalam penggunaan anggaran.

Berdasarkan hasil perhitungan varians (selisih) belanja maka penilaian pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas selama tahun 2011-2014 adalah sebagai berikut :

TABEL IV.6.

PENILAIAN VARIANS BELANJA

Tahun	Varians Belanja (Rp)	% (varians)	Kriteria
2011	1.507.245.975	8%	Baik
2012	1.646.692.984	10%	Baik
2013	2.550.725.350	13%	Baik
2014	516.665.812	3%	Baik

Sumber : Hasil Perhitungan, Data Diolah 2015

Berdasarkan hasil perhitungan tabel IV.6. ini menunjukkan bahwa adanya penghematan anggaran belanja pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas selama tahun 2011-2014. Penghematan yang dilakukan sesuai dengan karakteristik efesiensi dari *good governance*

(pemerintahan yang baik), hal ini menunjukkan bahwa sudah ada efisiensi anggaran belanja yang dilakukan dalam pengelolaan sumber daya publik atau anggaran.

Kriteria penilaian varians (selisih) belanja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas pada tabel IV.6. memiliki kriteria penilaian baik selama tahun 2011-2014. Anggaran belanja yang ditetapkan dan realisasi belanja memiliki selisih realisasi yang tidak melebihi anggaran belanja pada BAPELUH PPK Kab. Musi Rawas.

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas varians yang tertinggi terjadi pada tahun 2013 selisih sebesar Rp.2.550.725.350, karena penyerapan anggaran belanja modal hanya sebesar 34,99% sehingga mengakibatkan varians atau selisih belanja menjadi tinggi. Penyerapan anggaran belanja modal yang rendah ini disebabkan adanya perencanaan anggaran yang tidak terealisasi. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas untuk tahun 2013 penyerapan belanja operasi sudah efektif dengan persentase penyerapan sebesar 91,11%.

Selisih atau varians belanja yang kecil Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas terjadi pada tahun 2014 dengan selisih sebesar Rp. 516.665.812, penyerapan anggaran belanja sudah efektif karena persentase penyerapan sebesar 97% ini menunjukkan bahwa adanya penyusunan perencanaan anggaran yang baik. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas dalam pelaksanaan anggaran belanja operasi yang terserap sebesar 96,94% dan belanja modal yang terserap sebesar 96,65%

Secara keseluruhan anggaran dan realisasi anggaran belanja pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas selama tahun 2011-2014 memiliki persentase penyerapan anggaran belanja yakni sebesar 92%, 90%, 87% dan 97%. Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2011-2014 sudah efektif karena persentase penyerapan anggaran belanja diatas 80%.

1. Pertumbuhan Belanja Pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas

Hasil perhitungan pertumbuhan belanja menunjukkan bahwa terdapat peningkatan atau penurunan realisasi anggaran belanja yang terjadi dari tahun ketahun pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas.

Penurunan atau peningkatan ini dikarenakan adanya jumlah anggaran serta jumlah kegiatan yang jumlahnya berkurang dan bertambah selama tahun 2011-2014 pada BAPELUH PPK Kab. Musi Rawas.

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, pertumbuhan belanja selama tahun 2011-2014 pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas, maka kriteria penilaian pertumbuhan belanja adalah sebagai berikut :

TABEL IV.7.

PENILAIAN PERTUMBUHAN BELANJA

Tahun	Tingkat Pertumbuhan	Kriteria
2012	-9,32%	Turun
2013	6,00%	Naik
2014	-0,94%	Turun

Sumber : Hasil Perhitungan, Data Diolah 2015

Berdasarkan hasil perhitungan pertumbuhan belanja pada tabel IV.7. dapat dianalisis bahwa pertumbuhan belanja mengalami penurunan dan peningkatan atau berfluktuatif pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas selama tahun 2011-2014.

Pertumbuhan realisasi belanja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2012 negatif (turun) sebanyak 9,32% dibandingkan tahun 2011. Alasan penurunan belanja disebabkan jumlah anggaran belanja yang berkurang karena adanya pengurangan kegiatan yang dilaksanakan serta belanja modal, belanja barang dan jasa pada tahun 2011 lebih besar dibandingkan tahun 2012.

Hasil perhitungan tabel IV.7. menunjukkan bahwa Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas untuk tahun 2013 pertumbuhan belanja bergerak positif (naik) sebanyak 6% dibandingkan tahun 2012. Pertumbuhan belanja yang bergerak positif (naik) disebabkan adanya penambahan jumlah anggaran yang dilaksanakan dalam tahun 2013 pada

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas.

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas tahun 2014 untuk pertumbuhan realisasi belanja negatif (turun) sebanyak 0,94% dibandingkan tahun 2013. Pertumbuhan realisasi belanja yang negatif karena adanya pengurangan jumlah anggaran belanja untuk tahun 2014 dibandingkan tahun 2013 pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas.

2. Keserasian Belanja Pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas keseimbangan atau proporsi belanja selama tahun 2011-2014 lebih memprioritaskan untuk belanja operasi dibandingkan belanja modal, alasannya dikarenakan belanja operasi digunakan belanja kegiatan, belanja barang dan jasa serta belanja pegawai.

Berdasarkan hasil perhitungan keserasian belanja operasi terhadap total belanja selama tahun 2011-2014 pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas adapun penilaiannya adalah sebagai berikut :

TABEL IV.8.
KESERASIAN BELANJA OPERASI
TERHADAP TOTAL BELANJA

Tahun	Belanja Operasi	
	%	Kriteria
2011	91%	Sangat Serasi
2012	93%	Sangat Serasi
2013	97%	Sangat Serasi
2014	93%	Sangat Serasi

Sumber : Hasil Perhitungan, Data Diolah 2015

Berdasarkan tabel IV.8. dapat dianalisis bahwa keserasian belanja operasi terhadap total belanja selama tahun 2011-2014 menunjukkan kriteria penilaian yang sangat serasi. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan Kabupaten Musi Rawas telah mengalokasikan total belanja sudah sangat baik.

Belanja operasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas merupakan jumlah belanja langsung dan belanja tidak langsung serta belanja barang dan jasa. Belanja operasi terhadap total belanja pada BAPELUH PPK Kab. Musi Rawas berfluktuatif dari tahun ketahun namun memiliki kriteria sangat serasi dengan persentase yang berada dikisaran 80%-100%, meski belanja operasi mengalami peningkatan ataupun penurunan.

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas untuk tahun 2011 persentase keserasian belanja operasi terhadap total belanja sebesar 91% dengan kriteria sangat serasi dari total belanja yang dianggarkan. Alokasi belanja operasi lebih diprioritaskan pada tahun 2011 oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas. Selama tahun 2011 BAPELUH PPK Kab. Musi Rawas mengalokasikan dari jumlah belanja dengan belanja operasi yang paling diutamakan karena belanja operasi digunakan untuk kegiatan dibandingkan dengan membelanjakan modal.

Sedangkan pada tahun 2012 terjadi peningkatan keserasian belanja operasi sebanyak 2% menjadi 93% dibandingkan tahun 2012. Peningkatan belanja operasi membuat proporsi belanja modal pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas hanya sebesar 7% ini menunjukkan alokasi total belanja juga lebih memprioritaskan untuk belanja operasi. Belanja modal berkurang karena alokasi yang dianggarkan jumlahnya juga berkurang dari laporan realisasi anggaran.

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas untuk tahun 2013 memiliki kriteria keserasian belanja operasi terhadap total belanja sangat serasi juga. Tahun 2013 keseimbangan belanja operasi terhadap total belanja juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 sebanyak 4% menjadi 97% dan juga membuat proporsi belanja modal hanya sebesar 3% dari total belanja pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas. Belanja operasi diprioritaskan karena jumlah kegiatan BAPELUH PPK Kab. Musi Rawas pada tahun 2013 juga mengalami peningkatan sehingga alokasi jumlah

belanja operasi meningkat dibandingkan belanja modal.

Keseimbangan belanja operasi terhadap total belanja pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas untuk tahun 2014 yakni dengan persentase sebesar 93%. Keserasian belanja operasi terhadap total belanja juga memiliki kriteria sangat serasi pada tahun 2014.

Namun alokasi belanja operasi terhadap total belanja untuk tahun 2014 turun sebesar 4% dan membuat belanja modal naik menjadi 7% dari total belanja yang dilaksanakan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas. Alasan penurunan ini dikarenakan jumlah anggaran belanja berkurang yang mengakibatkan belanja operasi yang juga berkurang dibandingkan tahun 2013.

Secara keseluruhan selama tahun 2011-2014, keseimbangan total belanja lebih memprioritaskan belanja operasi dibandingkan belanja modal. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas, belanja operasi diprioritaskan karena untuk menjalankan kegiatan sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah pada Kabupaten Musi Rawas. Sedangkan belanja modal digunakan untuk membelanjakan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

3. Kinerja Anggaran Pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas

Anggaran digunakan untuk penilaian kinerja atas pelaksanaan anggaran yang ditetapkan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas atas kegiatan yang telah dilakukan dalam menggunakan anggaran selama tahun 2011-2014.

Anggaran belanja pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas dilaksanakan untuk membiayai kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas dihitung untuk melihat pertumbuhan belanja selama tahun 2011-2014, keseimbangan belanja dalam mengalokasikan

total belanja yang ada dan varians atau selisih belanja dari pelaksanaan anggaran belanja.

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan dengan menggunakan varians (selisih) belanja, pertumbuhan belanja dan keserasian belanja pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas selama tahun 2011-2014 maka dapat disimpulkan penilaian kinerja dari pelaksanaan belanja dapat dilihat pada tabel IV.9. sebagai berikut ini :

TABEL IV.9.
KINERJA ANGGARAN

Tahun	Varians Belanja	Pertumbuhan Belanja	Keserasian Belanja
			Belanja Operasi
2011	Baik	-	Sangat Serasi
2012	Baik	Turun	Sangat Serasi
2013	Baik	Naik	Sangat Serasi
2014	Baik	Turun	Sangat Serasi

Sumber : Tabel IV.6, IV.7 dan IV.8, Data Diolah 2015

Secara umum berdasarkan tabel IV.9. kinerja anggaran sudah baik ini dapat dilihat dari perhitungan varians belanja yang sudah efektif yakni realisasi tidak melebihi anggaran yang sudah ditetapkan. Pertumbuhan belanja meski berfluktuatif tapi dari segi penyerapan anggaran belanja sudah efektif juga.

Keserasian belanja operasi terhadap total belanja memiliki kriteria penilaian yang sudah sangat serasi dengan persentase yang berada dikisaran antara 80%-100%. Persentase keserasian belanja operasi terhadap total belanja sebanyak 91%, 93%, 97% dan 93% pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas selama tahun 2011-2014.

Pertumbuhan belanja yang berfluktuatif atau naik (turun) selama tahun 2011-2014 ini disebabkan adanya pengurangan atau penambahan jumlah anggaran belanja yang ditetapkan serta kegiatan atau program yang akan dilaksanakan juga mengalami penambahan dan pengurangan.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas yakni sebanyak

39 kegiatan untuk tahun 2011, sebanyak 25 kegiatan untuk tahun 2012, sebanyak 28 kegiatan untuk tahun 2013 serta sebanyak 29 kegiatan untuk tahun 2014. Pengurangan dan penambahan jumlah kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas.

Pertumbuhan belanja harus diimbangi dengan anggaran yang ada supaya tidak mengganggu kegiatan pemerintahan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas. Pertumbuhan belanja lebih harus memperhitungkan atau memprioritaskan anggaran yang ada sehingga perencanaan anggaran lebih baik lagi untuk berikutnya.

Berdasarkan hasil tabel IV.9. varians (selisih) antara anggaran dengan realisasi belanja sudah baik, karena realisasi belanja yang tidak melebihi anggaran yang ditetapkan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas selama tahun 2011-2014. Meskipun varians anggaran cukup berfluktuatif namun antara realisasi dengan anggaran sudah efektif ini dilihat dari hasil laporan realisasi anggaran belanja selama tahun 2011-2014.

Penyerapan anggaran belanja dalam laporan realisasi anggaran pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas selama tahun 2011-2014 yang memiliki persentase penyerapan diatas 80% dengan memiliki kriteria sudah efektif karena penyerapan atas pelaksanaan anggaran sebesar 92%, 90%, 87% dan 97%. Varians belanja membuat perencanaan anggaran akan menjadi lebih baik lagi untuk tahun berikutnya.

Penyerapan yang terendah terjadi pada tahun 2013 ini disebabkan kurang terserapnya belanja modal yang dianggarkan dengan pelaksanaannya. Sehingga hal ini membuat varians yang tinggi pada tahun 2013, maka diperlukan perencanaan anggaran yang lebih baik lagi untuk tahun berikutnya, agar anggaran terserap tidak terlalu rendah.

Varians belanja yang baik yakni realisasi belanja tidak melebihi anggaran yang ditetapkan serta penyerapan anggaran jangan terlalu rendah akan tetapi tidak melebihi anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Penyerapan anggaran belanja yang rendah bisa mengindikasikan adanya kelemahan dalam perencanaan anggaran yang akan

dilaksanakan. Penyerapan anggaran yang sudah efektif yakni berada diatas 80%.

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan terhadap keserasian belanja operasi terhadap total belanja pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas selama tahun 2011-2014 memiliki kriteria penilaian sangat serasi.

Kriteria penilaian ini merupakan adanya kinerja yang baik dalam mengalokasikan total belanja, karena belanja operasi merupakan belanja yang terdiri dari belanja pegawai serta belanja barang dan jasa yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas.

Belanja pegawai pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas adalah belanja yang digunakan untuk pegawai serta jumlah tenaga penyuluh di UPTBP (Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan) yang ada di Kabupaten Musi Rawas sehingga dapat membantu para petani mengembangkan keahlian dalam mengelola pertanian.

Kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas berguna untuk masyarakat supaya lebih baik dalam pengelolaan pertanian untuk mewujudkan kabupaten yang agropolitan *center*.

Mewujudkan kabupaten yang agropolitan *center* sangat memerlukan peranan penyuluhan karena penyuluhan menjalankan kegiatan seperti kegiatan pelatihan petani dan pelaku agrobisnis, peningkatan kemampuan lembaga petani dan kegiatan penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian atau perkebunan, serta kegiatan lain yang berguna bagi masyarakat khususnya Kabupaten Musi Rawas.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian mengenai “Analisis Varians, Pertumbuhan dan Keserasian Belanja Dalam Menilai Kinerja Anggaran pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas”, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil perhitungan varians memiliki kriteria baik, karena penyerapan anggaran efektif

sebesar 92%, 90%, 87% dan 97% selama tahun 2011-2014. Hasil perhitungan pertumbuhan belanja berfluktuatif selama tahun 2011-2014. Tahun 2012 pertumbuhan negatif sembilan koma tiga puluh dua persen artinya ada penurunan dari tahun 2011-2012. Namun pada tahun 2013 pertumbuhan belanja positif yakni enam persen dan tahun 2014 pertumbuhannya negatif sebesar nol koma sembilan puluh empat persen.

2. Hasil perhitungan keserasian belanja operasi memiliki kriteria sangat serasi dengan berada dikisaran delapan puluh persen sampai dengan seratus persen. Tahun 2011-2014 persentase keserasian belanja operasi yaitu sembilan puluh satu persen, sembilan puluh tiga persen, sembilan puluh tujuh persen dan sembilan puluh tiga persen.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim dan Syam Kusufi. 2011a. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Abdul Halim dan Syam Kusufi. 2012b. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas. 2011. *Laporan Realisasi Anggaran Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2011 dan 2010*. Muara Beliti.

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas. 2012. *Laporan Realisasi Anggaran Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011*. Muara Beliti.

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas. 2013. *Laporan Realisasi Anggaran Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2013 dan 2012*. Muara Beliti.

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas. 2014. *Laporan Realisasi Anggaran Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013*. Muara Beliti.

Danang Sunyoto. 2011. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi: Cetakan Satu*. Yogyakarta: CAPS.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 Tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan.

Mahmudi. 2010a. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik*. Yogyakarta: UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Mahmudi. 2011b. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.

Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.

Moh Mahsun dk. 2013. *Akuntansi Sektor Publik: Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (online) (www.bpk.go.id), diakses 26 Januari 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran. (online) (www.bpk.go.id), diakses 26 Januari 2015.

Program Strata Satu. 2014. *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian & Skripsi*. Lubuklinggau: Universitas Musi Rawas.

Rachmat. 2010. *Akuntansi Pemerintahan: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Pustaka Setia.

Sugiyono. 2011a. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013b. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.



Smart Accounting Journal
LPPM- UNIVERSITAS MUSI RAWAS
P-ISSN 2089-7901

**Alamat : Jl. Sultan Mahmud Badarrudi II Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I
Kota Lubuklinggau. WA/hp. 085267821542 /081379148277**